

# Peran *Education Management Information System* (EMIS) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Data di Ponpes Tahfizul Qur'an

Ahmad Ansori<sup>a,1</sup>, Rahmat Yoza Mandela<sup>b,2</sup>, Fahrullah Agustinus<sup>c,3</sup>, Rahel Adawiyah<sup>d,4</sup>, Salwa Riswanda S.<sup>e,5</sup>

<sup>a,b,c,d,e</sup> Islamic Education Management, Tarbiyyah and Teacher Training Faculty, Sultan Syarif Kasim State Islamic University

<sup>1</sup>[ahmadansori@uinsuskariau.ac.id](mailto:ahmadansori@uinsuskariau.ac.id), <sup>2\*</sup>[rahmatmandela0@gmail.com](mailto:rahmatmandela0@gmail.com), <sup>3</sup>[fahrullahagustinus897@gmail.com](mailto:fahrullahagustinus897@gmail.com), <sup>4</sup>[raheladawiyah75@gmail.com](mailto:raheladawiyah75@gmail.com), <sup>5</sup>[salwariswanda6@gmail.com](mailto:salwariswanda6@gmail.com)

\*Corresponding Author: [rahmatmandela0@gmail.com](mailto:rahmatmandela0@gmail.com)

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><i>Sejarah Artikel:</i> Diterima: 27 September 2025 Direvisi: 25 Oktober 2025 Disetujui: 20 November 2025 Tersedia Daring: 1 Desember 2025</p> <hr/> <p><i>Kata Kunci:</i> Akuntabilitas Kompetensi Operator Maintenance</p>	<p>Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Education Management Information System (EMIS) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas data di Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Sungai Pinang, mengidentifikasi kendala operasional dalam penerapannya, dan mengetahui strategi serta prospek ke depan dalam memperkuat tata kelola berbasis EMIS menuju prinsip good governance. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan kepala pesantren, operator EMIS, serta staf administrasi. Pengumpulan data mengacu pada pedoman semi-terstruktur untuk menangkap pengalaman, tantangan, dan persepsi terhadap sistem. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Moleong. Hasil menunjukkan EMIS efektif meningkatkan transparansi melalui akses data terbuka dan memperkuat akuntabilitas lewat dokumentasi digital yang terverifikasi. Namun, implementasinya terkendala lima masalah: gangguan sistem saat maintenance tanpa pemberitahuan, keterbatasan kompetensi operator, koordinasi internal yang lemah dalam pengumpulan dokumen, infrastruktur teknologi tidak memadai, serta minimnya sosialisasi dan pendampingan dari Kementerian Agama. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan EMIS tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kapasitas institusional, dukungan infrastruktur, dan sinergi antara kebijakan pusat dengan realitas lapangan. Dengan demikian, EMIS berpotensi menjadi instrumen tata kelola yang efektif apabila kendala operasional tersebut dapat diatasi secara sistematis dan berkelanjutan.</p>
	ABSTRACT
<p><i>Keywords:</i> Accountability Operator Competence Maintenance</p>	<p><i>This study aims to examine the role of the Education Management Information System (EMIS) in realizing data transparency and accountability at the Tahfizul Qur'an Islamic Boarding School in Sungai Pinang, identify operational obstacles in its implementation, and determine strategies and future prospects in strengthening EMIS-based governance towards the principles of good governance. Using a qualitative approach, the study was conducted through direct observation and in-depth interviews with the head of the Islamic boarding school, EMIS operators, and administrative staff. Data collection referred to semi-structured guidelines to capture experiences, challenges, and perceptions of the system. Data analysis was carried out</i></p>

*through data reduction, presentation, and drawing conclusions based on the Moleong model. The results indicate that EMIS is effective in increasing transparency through open data access and strengthening accountability through verified digital documentation. However, its implementation is hampered by five problems: system disruptions during unannounced maintenance, limited operator competency, weak internal coordination in document collection, inadequate technological infrastructure, and minimal outreach and mentoring from the Ministry of Religious Affairs. These findings confirm that the success of EMIS depends not only on system availability, but also on institutional capacity, infrastructure support, and synergy between central policies and field realities. Thus, EMIS has the potential to become an effective governance instrument if these operational constraints can be addressed systematically and sustainably.*

© 2025, Ahmad Ansori, Rahmat Yoza Mandela,  
Fahrullah Agustinus, Rahel Adawiyah, Salwa Riswanda S.  
This is an open access article under CC BY-SA license



How to Cite: Ansori, A., Mandela, R. Y., Agustinus, F., Adawiyah, R., & S., S. R. (2025). Peran Peran Education Management Information System (EMIS) dalam Transparansi dan Akuntabilitas Data di Ponpes Tahfizul Qur'an. Academy of Social Science and Global Citizenship Journal, 5(2), 85-97.  
<https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i2.3278>

## 1. Pendahuluan

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip mendasar dalam tata kelola lembaga pendidikan, termasuk pondok pesantren. Transparansi dipahami sebagai keterbukaan lembaga dalam menyajikan informasi yang akurat, jelas, dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan, kebijakan, serta pengelolaan sumber daya yang dijalankan (Fadilah et al., 2025). Kedua prinsip ini tidak dapat dipisahkan karena keterbukaan menjadi dasar untuk menciptakan pertanggungjawaban, sementara akuntabilitas memberikan makna yang lebih kuat terhadap keterbukaan itu sendiri. Banyak pondok pesantren masih menghadapi kendala dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal pengelolaan data. Data santri, tenaga pendidik, program kegiatan, hingga administrasi kelembagaan kerap belum terdokumentasi dengan baik, masih menggunakan metode manual, dan sulit diakses ketika dibutuhkan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan informasi, menyulitkan proses pengambilan keputusan, serta mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat maupun pemerintah terhadap pengelolaan lembaga.

Salah satu penyebab dari permasalahan tersebut adalah lemahnya sistem informasi pendidikan yang digunakan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa banyak lembaga pendidikan, termasuk pesantren, belum memiliki sistem manajemen informasi yang terintegrasi sehingga data yang ada cenderung tercecer, tidak akurat, dan sulit dipertanggungjawabkan. Hal ini berdampak pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga pendidikan berbasis pesantren. Sebagai jawaban atas persoalan tersebut, Kementerian Agama telah mengembangkan Education Management Information System (EMIS), yaitu sebuah sistem informasi manajemen pendidikan berbasis teknologi yang dirancang untuk mengelola data lembaga pendidikan secara terintegrasi, valid, dan berkesinambungan. EMIS bukan hanya berfungsi sebagai alat pendataan administratif, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat tata kelola pendidikan (Romdoniyah et al., 2024). Penelitian sebelumnya

menegaskan bahwa penerapan EMIS terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan data, memperkuat keterbukaan informasi, serta mendorong terciptanya pertanggungjawaban lembaga pendidikan di hadapan masyarakat maupun pemerintah.

Pondok pesantren telah menerapkan *Education Management Information System* (EMIS) 4.0 sebagai sistem pendataan resmi yang diwajibkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar bagi seluruh lembaga pendidikan di bawah naungannya. EMIS digunakan untuk mengelola data pondok pesantren secara komprehensif, mencakup peserta didik (santri), tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta rombongan belajar. Pengelolaan data dilakukan oleh operator pondok pesantren di bawah arahan kepala pondok pesantren, dengan mekanisme pelaporan melalui Berita Acara Pendataan (BAP) yang harus dilengkapi, ditandatangani, dan diunggah setiap semester. Namun, dalam pelaksanaannya, pondok pesantren menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat kelancaran dan ketepatan pendataan. Pertama, sistem EMIS kerap mengalami masa maintenance dari pusat, sehingga akses input data terganggu pada saat-saat kritis terutama di awal tahun ajaran baru ketika data santri baru harus segera dimasukkan. Kedua, keterbatasan kompetensi teknis operator dalam mengoperasikan EMIS 4.0 menyebabkan kesalahan input data atau keterlambatan dalam memperbarui informasi. Ketiga, kurangnya koordinasi antara bagian administrasi, wali kelas, dan orang tua santri dalam pengumpulan dokumen pendukung seperti Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, atau surat pindah mengakibatkan data tidak lengkap atau tidak akurat. Keempat, koneksi internet yang tidak stabil di lokasi pondok pesantren turut memperlambat proses sinkronisasi dan unggah data ke server pusat. Terakhir, minimnya sosialisasi dari pihak berwenang mengenai pembaruan fitur atau perubahan alur kerja EMIS 4.0 membuat operator kesulitan menyesuaikan diri dengan sistem terbaru.

Meskipun demikian, pondok pesantren berupaya mengatasi hambatan tersebut melalui strategi antisipatif, seperti menjadwalkan input data saat sistem stabil, memberikan pelatihan internal bagi operator, serta memperkuat koordinasi internal dan komunikasi dengan orang tua santri. Selain itu, kepala pondok pesantren secara aktif menjaga akuntabilitas dan transparansi dengan menyampaikan hasil pendataan EMIS kepada seluruh tenaga pendidik, sehingga semua pihak memahami kondisi riil pondok pesantren berdasarkan data resmi. Penerapan EMIS di pondok pesantren tahfizul Quran menjadi sangat penting karena sistem ini dapat menjawab kebutuhan akan data yang transparan dan akuntabel. Melalui EMIS, pesantren mampu menyajikan informasi yang akurat dan terbuka, sekaligus memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas setiap program dan kebijakan. Dengan demikian, keberadaan EMIS diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah pengelolaan data sekaligus memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan yang modern, terpercaya, dan berintegritas.

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa penerapan *Education Management Information System* (EMIS) mampu menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data di lembaga pendidikan. Dengan dasar regulasi yang kuat melalui KMA No.83 Tahun 2022, EMIS menjadi pusat integrasi data pendidikan pada Kementerian Agama (Indonesia, 2024). Penelitian (Ramadhan et al., 2024) menegaskan bahwa pemanfaatan EMIS pada lembaga pendidikan Islam tidak hanya mempermudah pengelolaan data, tetapi juga meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik. Hal senada dikemukakan oleh (Hamdi, 2025) yang menemukan bahwa EMIS berperan signifikan dalam mengurangi kesalahan administrasi dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan di mata masyarakat maupun pemerintah. Dengan dukungan teori *good governance* dari (Riwukore et al., 2022) yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan mekanisme pertanggungjawaban sebagai pilar utama tata kelola yang baik, EMIS terbukti relevan untuk menjawab persoalan lemahnya transparansi dan akuntabilitas di pondok pesantren. Artinya, melalui EMIS, pondok pesantren tahfizul Quran dapat menyajikan

data yang terbuka, akurat, serta mudah diakses, sekaligus memastikan adanya dasar pertanggungjawaban yang jelas atas setiap kebijakan dan kegiatan yang dijalankan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Education Management Information System (EMIS) dalam mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas data di pondok pesantren tahfizul Quran.

## 2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fenomenologi. Tahapan pengumpulan data dimulai dengan persiapan lembar observasi dan pedoman wawancara. Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu di Sungai Pinang, untuk mengamati secara nyata bagaimana sistem *Education Management Information System* (EMIS) diterapkan dan berperan dalam transparansi serta akuntabilitas data di Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola pondok pesantren, staf administrasi, dan pengguna sistem EMIS, guna memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman, kendala, dan manfaat penggunaan sistem tersebut.

Setelah itu, wawancara dilakukan untuk menggali informasi kualitatif yang mendukung hasil observasi. Data yang terkumpul kemudian didokumentasikan secara sistematis untuk memudahkan analisis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan mengkategorikan dan menginterpretasikan data hasil observasi dan wawancara. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dan mengeliminasi data yang tidak berkaitan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang menggambarkan peran EMIS dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data di pondok pesantren. Akhirnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan yang diperoleh untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas sistem EMIS dalam konteks tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan metode analisis kualitatif yang digunakan oleh Moleong (Risnita, 2024) dalam penelitiannya, yang menekankan pentingnya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Education Management Information System (EMIS) di lingkungan pondok pesantren telah menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya transformasi digital dalam tata kelola pendidikan Islam di Indonesia. Di Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Sungai Pinang, EMIS 4.0 tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai fondasi strategis dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan lembaga. Namun, di balik manfaat signifikan yang ditawarkan, implementasi sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis yang memerlukan respons institusional yang berkelanjutan. Pembahasan berikut menguraikan temuan penelitian ini dalam tiga aspek utama: (1) peran EMIS dalam transparansi dan akuntabilitas lembaga, (2) kendala operasional yang menghambat optimalisasi sistem, dan (3) strategi serta prospek ke depan dalam memperkuat tata kelola berbasis EMIS menuju prinsip *good governance*.

### A. Peranannya dalam Transparansi serta Akuntabilitas

Sejak diterapkan pada tahun 2022, EMIS telah mengubah paradigma pengelolaan data di Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an dari sistem manual berbasis arsip kertas menjadi sistem digital terintegrasi yang lebih efisien, akurat, dan dapat diverifikasi. Proses pendataan yang sebelumnya memakan waktu dua hingga tiga minggu kini dapat diselesaikan dalam kurang dari lima hari kerja, dengan tingkat akurasi data yang signifikan tinggi. Perubahan ini tidak terlepas dari komitmen kepemimpinan pesantren yang menempatkan data sebagai dasar pengambilan kebijakan, sekaligus dari pendampingan rutin yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

Berkaitan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan kepala sekolah diperoleh informasi bahwa:

“Sebelum ada EMIS, kami memang mengandalkan arsip manual. Banyak data yang tidak sinkron antara catatan di kelas, bagian administrasi, dan laporan yang dikirim ke kementerian. Setelah EMIS diterapkan, semuanya lebih tertata, lebih cepat, dan kami punya dasar data yang jelas untuk mengambil keputusan. Ini sangat membantu dalam meningkatkan mutu tata kelola pesantren.” (Wawancara Kepala Sekolah, 2025).

Lebih dari sekadar alat input data, EMIS berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan informasi yang mendukung dua pilar utama tata kelola yang baik: transparansi dan akuntabilitas. Sebelum EMIS, informasi mengenai jumlah santri, profil tenaga pendidik, alokasi anggaran, dan laporan kegiatan sering kali tidak terdokumentasi secara sistematis dan sulit diakses oleh pihak luar. Kini, seluruh data tersebut diunggah ke portal resmi Kementerian Agama dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, wali santri, donatur, maupun instansi pemerintah. Keterbukaan ini secara nyata meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan pesantren.

Hasil wawancara dengan operator EMIS juga menunjukkan bagaimana sistem ini meningkatkan transparansi lembaga. Operator mengatakan:

“Dengan EMIS, semuanya terekam dan bisa dilihat jejaknya. Data santri, guru, kegiatan, hingga laporan keuangan yang wajib dilaporkan itu masuk ke sistem. Jadi tidak ada lagi data yang hilang atau berubah-ubah. Kami terbantu karena semua proses punya bukti digital, dan wali santri pun bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas.” (Wawancara operator EMIS, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pondok pesantren Tahfidzul Qur'an telah berhasil menerapkan EMIS sebagai sarana utama pengelolaan administrasi dan pendataan. EMIS tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pesantren. Temuan ini sejalan dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa Pesantren telah memanfaatkan sebagian besar fitur EMIS secara optimal dalam pengelolaan data Santri, tenaga pendidik, dan laporan kelembagaan.

Menurut (Gaol et al., 2024), transparansi merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan *good governance*, karena memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja lembaga. Dalam konteks pesantren, transparansi data melalui EMIS memungkinkan wali santri memantau status pendaftaran dan perkembangan akademik anak mereka, sementara donatur dapat memverifikasi penggunaan dana berdasarkan laporan yang terintegrasi dengan sistem. Hal ini sejalan dengan temuan Ouyang dan Huang yang menyatakan bahwa sistem informasi digital menciptakan jejak audit yang permanen, sehingga setiap aktivitas administratif dapat dilacak dan diverifikasi kapan pun (Peker et al., 2022).

Di sisi lain, EMIS juga memperkuat akuntabilitas internal dan eksternal pesantren. Setiap keputusan mulai dari penerimaan santri baru, distribusi tenaga pendidik, hingga pelaporan keuangan program tahfiz kini terekam secara digital dengan *time stamp* dan verifikasi operator. Data *real-time* yang dihasilkan memungkinkan pimpinan pesantren melakukan evaluasi kinerja berbasis bukti (*evidence-based evaluation*), sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan kepada Kementerian Agama secara tepat waktu dan konsisten. (Dewi et al., 2025) menegaskan bahwa sistem informasi berbasis teknologi berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal yang efektif, sementara (Rahmah et al., 2025) menambahkan bahwa EMIS menjadi jembatan penting antara manajemen internal lembaga dan mekanisme akuntabilitas eksternal kepada negara.

Dengan demikian, EMIS tidak hanya menggantikan arsip manual, tetapi juga mentransformasikan budaya organisasi pesantren menuju tata kelola yang berbasis data,



terbuka, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren meskipun berakar pada tradisi keagamaan mampu beradaptasi dengan tuntutan modernisasi tata kelola tanpa kehilangan jati dirinya, sebagaimana ditegaskan dalam Roadmap Digitalisasi Pendidikan Islam 2020–2024 (Yusuf et al., 2025).

## **B. Kendala Operasional dalam Penerapan EMIS di Pondok Pesantren**

Meskipun manfaat EMIS sangat nyata dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pendataan, penerapannya di lapangan khususnya di lingkungan pondok pesantren seperti Tahfizul Qur'an Sungai Pinang tidak berjalan mulus. Observasi lapangan, wawancara mendalam dengan operator, dan kepala pesantren, serta analisis dokumen pendukung mengungkapkan lima kendala operasional utama yang saling berkaitan dan secara kolektif menghambat optimalisasi sistem. Kelima kendala ini bersifat teknis, struktural, maupun koordinatif, dan masing-masing memiliki dampak langsung terhadap kualitas, kelengkapan, dan ketepatan waktu pelaporan data melalui EMIS.

### **1. Gangguan teknis dari pusat**

Khususnya saat sistem EMIS mengalami masa maintenance atau pembaruan server. Masalah ini bukan hanya bersifat insidental, melainkan berulang dan kerap terjadi pada periode-periode krusial, seperti awal tahun ajaran baru (Juli-Agustus) atau menjelang batas akhir pelaporan semester (Januari dan Juli). Yang lebih memperparah situasi adalah tidak adanya pemberitahuan resmi atau jadwal transparan dari pengelola pusat mengenai waktu maintenance. Akibatnya, operator tidak dapat merencanakan jadwal input data secara strategis.

Dalam wawancara, operator EMIS menyatakan:

“Sering kali kami sudah siap input data, tapi EMIS-nya malah down. Kadang dua sampai tiga hari tidak bisa dibuka sama sekali, dan tidak ada pemberitahuan dari pusat. Akhirnya pekerjaan menumpuk dan BAP terlambat kami cetak.” (Wawancara operator EMIS, 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa gangguan teknis Pusat menjadi kendala serius dalam optimalisasi pemanfaatan Emis di pesantren. Ketidakstabilan server dan tidak adanya notifikasi resmi dari pengelola pusat menyebabkan proses pendataan tertunda dan berdampak pada keterlambatan pencetakan dokumen penting seperti BAP.

Pada praktiknya, ketika sistem tiba-tiba tidak dapat diakses selama 2-3 hari berturut-turut, proses pendataan santri baru yang memerlukan verifikasi dokumen, entri NISN, dan pengisian data keluarga terhenti total. Hal ini berdampak langsung pada keterlambatan pencetakan Berita Acara Pendataan (BAP), yang merupakan dokumen wajib untuk validasi data semesteran. Tanpa BAP yang ditandatangani kepala pesantren dan diunggah kembali ke sistem, status kelengkapan data lembaga dianggap belum final, sehingga berpotensi memengaruhi proses verifikasi bantuan operasional, akreditasi, atau bahkan rekomendasi santri untuk program beasiswa. Dalam konteks EMIS sebagai sistem real-time, ketidakstabilan akses dari sisi server pusat justru menjadi penghambat utama yang berada di luar kendali lembaga.

### **2. Keterbatasan kompetensi teknis operator menjadi hambatan internal yang signifikan.**

Meskipun operator telah mengikuti pelatihan dasar yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten, pelatihan tersebut umumnya hanya mencakup antarmuka dasar dan entri data sederhana. Sementara itu, EMIS 4.0 sebagai versi terbaru memperkenalkan fitur-fitur lanjutan seperti *cross-validation* antar modul (misalnya, kesesuaian data santri dengan data rombongan belajar), integrasi data kepegawaian dengan riwayat pendidikan dan sertifikasi guru, serta ekspor laporan analitik dalam format Excel atau PDF untuk keperluan audit internal. Operator yang tidak memahami logika sistem sering kali melakukan kesalahan teknis, seperti

menginput NISN ganda untuk satu santri karena sistem tidak merespons saat loading, atau memasukkan data KK tanpa memverifikasi nama sesuai akta kelahiran.

Kepala Sekolah mengungkapkan dalam wawancaranya:

“Operator kami sebenarnya sudah mengikuti pelatihan, tapi EMIS yang sekarang itu lebih rumit. Ada bagian-bagian validasi yang mereka belum paham, jadi kadang ada data yang salah masuk tapi tidak terdeteksi. Ini membuat laporan kami sering dikembalikan oleh kemenag.” (Wawancara Kepala Sekolah, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun operator sekolah sudah pernah mengikuti pelatihan, mereka masih kesulitan menggunakan EMIS karena sistem yang baru lebih rumit. Beberapa bagian validasi belum mereka pahami sehingga sering terjadi kesalahan data tanpa disadari. Akibatnya, laporan sekolah sering dikembalikan oleh Kemenag untuk diperbaiki ulang.

Kesalahan semacam ini tidak selalu terdeteksi secara otomatis oleh sistem, sehingga data yang tampak “lengkap” di permukaan ternyata tidak valid saat diverifikasi oleh tim pengawas dari Kemenag. Lebih lanjut, keterbatasan ini juga menghambat pemanfaatan EMIS sebagai alat analisis misalnya, untuk mengetahui rasio santri per guru, distribusi usia santri, atau tingkat kelengkapan dokumen administratif karena operator tidak mampu mengoperasikan menu laporan lanjutan. Akibatnya, EMIS hanya dimanfaatkan sebagai “formulir digital”, bukan sebagai sistem informasi manajemen yang sesungguhnya.

3. Kurangnya koordinasi internal dalam pengumpulan dokumen pendukung.

Hal ini mencerminkan lemahnya mekanisme alur kerja antar-unit di dalam pesantren. Proses pendataan EMIS tidak hanya bergantung pada operator, tetapi juga pada ketersediaan dokumen resmi dari santri dan keluarganya, serta verifikasi oleh wali kelas atau bagian penerimaan santri. Namun, dalam praktiknya, tidak ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang mengatur tenggat waktu penyerahan dokumen, tanggung jawab verifikasi, atau mekanisme pelacakan dokumen yang belum lengkap.

Operator EMIS menjelaskan:

“Kadang kami sudah dikejar tenggat, tapi dokumen dari santri belum lengkap. Akhirnya untuk sementara kami isi dengan data seadanya dulu. Tapi nanti saat diverifikasi, datanya tidak cocok, ini jadi masalah lagi.” (Wawancara Operator EMIS, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah sering terburu-buru mengisi data karena harus mengejar tenggat waktu, sementara dokumen dari santri belum lengkap. Akibatnya, mereka terpaksa memasukkan data sementara. Namun saat dilakukan verifikasi, data yang diisi tidak sesuai dengan dokumen asli sehingga menimbulkan masalah baru. Dengan kata lain, keterlambatan berkas dari santri membuat pengisian data menjadi tidak akurat dan akhirnya menyulitkan proses verifikasi.

Akibatnya, saat operator mulai menginput data, banyak santri baru yang belum menyerahkan Kartu Keluarga (KK) atau Akta Kelahiran dokumen wajib yang menjadi dasar validasi identitas dalam EMIS. Untuk memenuhi tenggat pelaporan, operator terpaksa mengisi data dengan informasi sementara (misalnya, menyalin data KK dari saudara kandung atau mengosongkan kolom nomor akta). Data semacam ini lolos dari sistem karena EMIS 4.0 tidak selalu memblokir entri parsial, tetapi akan menjadi masalah besar saat dilakukan audit lapangan atau saat santri mengajukan dokumen resmi di kemudian hari yang ternyata tidak sesuai dengan data yang telah diinput. Ketidakkonsistenan ini tidak hanya merusak integritas database lembaga, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik administratif dengan orang tua santri atau instansi terkait.

4. Infrastruktur teknologi yang belum memadai.

Minimnya kualitas Infrastruktur menjadi penghambat struktural yang paling nyata di tingkat operasional. Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an berlokasi di wilayah semi-pedesaan Kabupaten Kampar, di mana jaringan internet seluler meskipun tersedia sangat tidak stabil, terutama selama musim hujan ketika menara sinyal sering mengalami gangguan listrik. Koneksi yang putus-nyambung menyebabkan proses *upload* data sering gagal di tengah jalan, sehingga operator harus mengulang entri dari awal. Selain itu, perangkat komputer yang digunakan oleh pesantren sebagian besar merupakan donasi lama dengan spesifikasi minimal (RAM 2 GB, prosesor generasi lama), yang tidak mampu menjalankan browser modern secara optimal saat mengakses EMIS 4.0 sistem yang membutuhkan pemrosesan JavaScript intensif dan kompatibilitas dengan layanan cloud.

Kepala Sekolah menyampaikan dalam wawancaranya:

"Kami pakai komputer lama, kadang hang waktu buka EMIS. Internet juga sering putus, terutama kalau hujan. Kalau lagi upload data bisa gagal terus. Operator terpaksa kerja lebih lama karena harus ulang dari awal." (Wawancara Kepala Sekolah, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa proses pengisian data EMIS terhambat oleh fasilitas yang kurang memadai. Komputer yang sudah lama sering mengalami hang dan jaringan internet tidak stabil, terutama saat hujan. Akibatnya, proses unggah data sering gagal dan operator harus mengulang pekerjaannya, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan tugas.

Akibatnya, halaman sering *freeze*, formulir tidak merespons, atau sesi login tiba-tiba berakhir tanpa peringatan. Kondisi ini memperpanjang waktu kerja operator dan meningkatkan risiko kehilangan data yang belum disimpan. Bahkan proses sederhana seperti mencetak BAP pun sering gagal karena sistem tidak merespons perintah cetak akibat *buffer* yang penuh atau *timeout* koneksi. Tanpa infrastruktur dasar yang memadai komputer layak pakai, jaringan internet stabil, dan cadangan daya listrik penerapan EMIS tetap menjadi beban operasional, bukan solusi efisiensi.

5. Minimnya sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan dari pihak Kementerian Agama.

Tentu akan menciptakan kesenjangan pengetahuan yang berkelanjutan antara kebijakan pusat dan realitas lapangan. Setiap kali EMIS mengalami pembaruan baik dalam antarmuka, alur validasi, maupun kebijakan entri data tidak ada mekanisme resmi yang menjamin informasi tersebut sampai ke operator di tingkat lembaga. Tidak ada surat edaran teknis, tidak ada webinar wajib, dan tidak ada panduan pembaruan yang diunggah ke portal resmi dalam format yang mudah diakses. Akibatnya, operator sering kali baru mengetahui adanya perubahan ketika sistem tiba-tiba menolak entri data yang sebelumnya diterima, atau muncul notifikasi error yang tidak dijelaskan. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya sumber informasi adalah grup WhatsApp informal antar-operator se-Kabupaten Kampar, di mana informasi beredar secara tidak terverifikasi. Misalnya, ketika EMIS 4.0 mulai mewajibkan kolom "Nomor HP Orang Tua" sebagai bagian dari validasi data santri, banyak operator awalnya mengosongkannya karena menganggap tidak wajib hingga akhirnya data mereka ditolak saat verifikasi. Tanpa pendampingan teknis yang berkelanjutan, operator bekerja dalam ketidakpastian, dan setiap pembaruan sistem justru dirasakan sebagai hambatan, bukan peningkatan layanan.

Operator menjelaskan hal ini dalam wawancara:

"Kalau ada pembaruan, kami biasanya tahunya dari grup WhatsApp. Tidak ada pemberitahuan dari pusat. Tiba-tiba ada kolom baru atau aturan validasi baru, dan kami



harus cari-cari sendiri supaya datanya tidak ditolak.” (Wawancara Operator EMIS, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi tentang perubahan atau pembaruan EMIS tidak disampaikan secara resmi oleh pusat. Sekolah biasanya hanya mengetahui perubahan tersebut dari grup WhatsApp. Akibatnya, ketika ada kolom atau aturan baru pada sistem, operator harus mencari tahu sendiri cara mengisinya agar data tidak ditolak. Ini membuat proses pengelolaan data menjadi lebih sulit karena kurangnya informasi resmi dan jelas.

Secara keseluruhan, kelima kendala operasional ini gangguan teknis pusat, keterbatasan kompetensi operator, lemahnya koordinasi internal, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, dan minimnya sosialisasi bukanlah masalah terpisah, melainkan saling memperkuat satu sama lain. Misalnya, infrastruktur buruk memperparah dampak dari gangguan server pusat; keterbatasan kompetensi operator diperparah oleh kurangnya panduan resmi; dan koordinasi internal yang lemah membuat operator semakin kewalahan saat harus mengejar tenggat di tengah sistem yang tidak stabil.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa operator kesulitan merencanakan waktu input data secara efektif karena sistem sering tidak dapat diakses pada periode-periode krusial.

Permasalahan-permasalahan ini sejalan dengan temuan (Nurhidayati & Thaufani, 2025) yang menyatakan bahwa transformasi digital di lembaga pendidikan Islam di daerah terkendala oleh kesenjangan infrastruktur dan literasi digital. Demikian pula, (Itsna, 2025) menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan dukungan eksternal yang berkelanjutan dua hal yang masih menjadi tantangan nyata dalam konteks operasional EMIS di pondok pesantren.

### **C. Strategi Optimalisasi dan Prospek Penguatan Tata Kelola Berbasis EMIS Menuju *Good Governance***

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an telah mengembangkan sejumlah strategi internal yang menunjukkan komitmen kuat terhadap keberlanjutan sistem EMIS. Pertama, pesantren secara berkala menyelenggarakan *capacity building* bagi staf administrasi, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam memahami filosofi manajemen berbasis data (Lukman et al., 2022). Kedua, pesantren menjalin kemitraan aktif dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk memperoleh bantuan perangkat keras, akses internet yang lebih stabil, dan pendampingan teknis langsung. Ketiga, dibentuk tim koordinasi internal yang terdiri dari kepala pesantren, operator, wali kelas, dan bagian administrasi untuk memastikan kelengkapan dokumen santri sejak proses pendaftaran awal. Keempat, diterapkan jadwal evaluasi bulanan untuk memastikan data selalu diperbarui dan diverifikasi secara berkala.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah, diketahui bahwa upaya-upaya ini memang menjadi fokus utama lembaga:

“Kami di pesantren sadar bahwa EMIS ini bukan sekedar kewajiban, tetapi kebutuhan untuk menata data kami dengan baik. Karena itu kami adakan pelatihan internal supaya staf bisa ikut belajar. Kami juga koordinasi dengan kemenag untuk meminta pendampingan dan bantuan perangkat, dan alhamdulillah beberapa sudah terealisasi.” (Wawancara Kepala Sekolah, 2025).

Operator EMIS juga menegaskan pentingnya strategi internal terutama pembentukan tim koordinasi dan evaluasi rutin:

“Dengan adanya tim khusus, kami lebih terbantu. Jadi tidak hanya operator yang bekerja, tapi semua bagian ikut memastikan dokumen santri lengkap. Evaluasi bulanan juga

membuat data tidak menumpuk di akhir semester dan EMIS jadi lebih mudah dijalankan.” (Wawancara Operator EMIS, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah dan operator tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak pesantren menyadari pentingnya EMIS bukan hanya sebagai kewajiban pelaporan, tetapi sebagai cara untuk menata data lembaga dengan baik. Oleh karena itu, pesantren melakukan pelatihan internal, membentuk tim khusus, dan bekerja sama dengan Kemenag untuk mendapatkan pendampingan serta bantuan sarana. Dengan adanya tim koordinasi dan evaluasi rutin, pengelolaan EMIS menjadi lebih ringan karena tidak hanya ditangani satu operator, tetapi dibantu oleh seluruh bagian yang memastikan kelengkapan data. Evaluasi bulanan juga membantu data tidak menumpuk, sehingga pengisian EMIS menjadi lebih mudah dan teratur.

Namun, upaya internal saja tidak cukup. Ke depan, diperlukan intervensi kebijakan dari tingkat nasional dan regional untuk memastikan pemerataan dan keberlanjutan penerapan EMIS di seluruh pesantren, terutama yang berada di daerah terpencil. Harapan utama meliputi: (1). Penerapan sistem notifikasi resmi sebelum masa maintenance EMIS, agar lembaga dapat mengatur jadwal input data secara strategis; (2). Penyediaan panduan teknis interaktif, termasuk video tutorial dan *chatbot* bantuan, yang dapat diakses kapan pun oleh operator; (3). Peningkatan frekuensi pelatihan lanjutan dan pendampingan lapangan oleh tim teknis Kementerian Agama, bukan hanya saat peluncuran sistem; (4). Pengalokasian bantuan infrastruktur digital seperti laptop, modem 4G, atau solar panel untuk daerah tanpa listrik melalui program afirmatif bagi pesantren di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal); (5). Pengembangan versi offline EMIS yang memungkinkan input data tanpa koneksi internet, dengan mekanisme sinkronisasi otomatis saat jaringan tersedia sebuah solusi yang telah diuji coba di beberapa negara berkembang (UNESCO, 2023).

Dalam wawancara, Kepala Sekolah mengungkapkan harapan besar terhadap dukungan pemerintah tersebut:

“Kalau bisa nanti ada pemberitahuan resmi setiap kali EMIS diperbarui, supaya kami bisa mengatur jadwal. Kami juga berharap ada pelatihan lanjutan yang lebih sering. Apalagi pesantren di daerah seperti kami butuh bantuan jaringan dan perangkat supaya EMIS bisa berjalan maksimal.” (Wawancara Kepala Sekolah, 2025).

Operator EMIS pun menyampaikan hal serupa terkait perlunya panduan teknis yang lebih jelas:

“Kadang kami bingung kalau ada pembaruan. Kalau ada video tutorial atau panduan resmi dari Kemenag, itu sangat membantu. Kami juga berharap ada versi offline karena jaringan di sini kadang tidak stabil.” (Wawancara Operator EMIS, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara kepala sekolah dan operator tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah dan operator sangat membutuhkan dukungan yang lebih jelas dari pihak pusat terkait penggunaan EMIS. Mereka berharap setiap pembaruan diberikan melalui pemberitahuan resmi, lengkap dengan panduan atau video tutorial agar tidak terjadi kebingungan saat mengisi data. Selain itu, sekolah di daerah juga memerlukan pelatihan lanjutan, jaringan internet yang lebih stabil, dan perangkat yang memadai. Bahkan, operator mengusulkan adanya versi offline karena kondisi jaringan di daerah sering bermasalah.

Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat efektivitas EMIS, tetapi juga memperluas akses terhadap tata kelola modern bagi seluruh lembaga pendidikan Islam. Dalam perspektif yang lebih luas, EMIS berpotensi menjadi *governance tool* yang menjembatani nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip *good governance*: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Melalui EMIS, pesantren dapat membangun ekosistem pendidikan yang tidak hanya religius, tetapi juga kredibel, responsif, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

Dengan demikian, meskipun tantangan masih ada, arah transformasi yang diambil oleh Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an mencerminkan komitmen kolektif untuk mewujudkan pendidikan Islam yang berintegritas, berbasis data, dan berorientasi pada pelayanan publik sebuah visi yang sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pendidikan nasional di era digital.

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas dan pendampingan sangat penting agar EMIS dapat berjalan lebih optimal di Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an.

#### **4. Kesimpulan**

Penerapan Education Management Information System (EMIS) di Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Sungai Pinang terbukti membawa perubahan besar terhadap tata kelola lembaga. EMIS tidak hanya membantu pesantren dalam mengatur data santri, guru, dan kelembagaan secara digital, tetapi juga menjadikan pengelolaan data lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui sistem ini, proses pendataan menjadi lebih cepat, valid, dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan serta pelaporan kepada pemerintah. Meski manfaatnya besar, pelaksanaan EMIS masih menghadapi beberapa kendala. Gangguan sistem dari pusat, keterbatasan kemampuan operator, lemahnya koordinasi antarbagian dalam pengumpulan dokumen, fasilitas teknologi yang belum memadai, serta minimnya pendampingan dari Kementerian Agama membuat pemanfaatan EMIS belum optimal. Hambatan ini saling berkaitan dan perlu ditangani secara terpadu, baik oleh internal pesantren maupun pihak pemerintah.

Pesantren sendiri telah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki pengelolaan EMIS melalui pelatihan internal, pembentukan tim koordinasi, dan evaluasi rutin. Namun, upaya tersebut perlu didukung oleh pemerintah, terutama dalam bentuk pembaruan sistem yang terinformasi dengan jelas, pelatihan berkelanjutan, penyediaan panduan teknis yang mudah diakses, serta bantuan infrastruktur khususnya bagi pesantren di daerah. Secara keseluruhan, EMIS memiliki potensi kuat sebagai alat modernisasi tata kelola pendidikan Islam. Jika hambatan teknis dan kebijakan dapat diatasi secara berkelanjutan, pesantren akan mampu menjadi lembaga yang tidak hanya religius dan berbasis tradisi, tetapi juga profesional, transparan, dan dipercaya publik.

#### **5. Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing dan rekan sejawat yang telah memberikan arahan, masukan, serta dorongan selama proses penulisan berlangsung. Terima kasih juga kepada pihak lembaga pendidikan dan rekan peneliti yang telah berbagi referensi serta pengalaman berharga terkait penerapan pemetaan proses dan manajemen mutu pendidikan. Tidak lupa, penulis menghargai dukungan keluarga dan sahabat yang selalu memberikan semangat sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### **6. Daftar Pustaka**

- Dewi, A. K., Sibarani, B. K., Saputra, E., Norazlina, N., Susanti, S., & Syafira, Y. (2025). Strategi Efektif Pengendalian Internal dalam Keamanan Sistem Informasi Akuntansi untuk Perlindungan Data Keuangan. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 11(1), 138–148. <https://www.ejournal.polraf.ac.id/index.php/JIRA/article/view/838>
- Fadilah, N., Ardiansyah, M. Y., & Firdaus, M. (2025). Integrasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepercayaan Publik Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 134–

149. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/article/view/7124>
- Gaol, L. L., Santoso, E. B., & Prasetyo, A. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://journal.unespadang.ac.id/jaaip/article/view/233>
- Hamdi, L. (2025). Integrasi Emis Dalam Dunia Pendidikan: Solusi Inovatif Atau Beban Administratif? *Edukatif: Jurnal Kreativitas Dalam Pendidikan*, 6(1). <https://ijurnal.com/1/index.php/jkp/article/view/413>
- Indonesia, K. A. R. (2024). *EMIS 4.0: Transformasi Digital Data Pendidikan Islam*. 30 Juni. <https://kemenag.go.id/kolom/emis-4-0-transformasi-digital-data-pendidikan-islam-eOEUC>
- Itsna, I. R. (2025). Manajemen Pendidikan Islam Di Tengah Arus Disrupsi: Refleksi Konseptual Untuk Reposisi Strategis Lembaga Islam Di Kediri. *Innovasi: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 11(2), 191–201. <https://journal.nuspublications.or.id/innovasi/article/view/158>
- Lukman, A., Modding, B., & Gani, A. (2022). Capacity Management Building Dalam Memfasilitasi Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi Swasta Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilyah IX. *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 6(2), 316–342. <https://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/emor/article/view/2410>
- Nurhidayati, R., & Thaufani, A. (2025). Mendorong Literasi Digital Guru Melalui Manajemen Pendidikan: Tinjauan Literatur. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 1705–1713. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp/article/view/926>
- Peker, I., AR, I. M., Erol, I., & Searcy, C. (2022). Leveraging blockchain in response to a pandemic through disaster risk management: an IF-MCDM framework. In *Operations Management Research* (pp. 1–26). <https://doi.org/10.1007/s12063-022-00340-1>
- Rahmah, M., Akbar, M. T., & Saputra, M. R. (2025). Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. *As-Sulthan Journal of Education*, 1(4), 835–844. <https://ojssulthan.com/asje/article/view/143>
- Ramadhan, R. A., Azizah, U. N., Nur'aini, K., Sukmawati, A., & Rajanto, S. H. (2024). Optimalisasi Penggunaan Emis dalam Proses Pengolahan Data Madrasah Pada Seksi Pendidikan Madrasah (PENDMA) di Kementerian Agama Kabupaten Kediri. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 6(2), 203–211. <https://jurnalftk.uinsa.ac.id/index.php/JAPI/article/view/3429>
- Risnita, R. (2024). Pendekatan Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Tahapan Penelitian. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 82–92. <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/903>
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1). <https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/1974>
- Romdoniyah, F. F., Ibrahim, T., & Arifudin, O. (2024). Implementasi Kebijakan Education Mangement Information System (EMIS) Di Seksi PD. Pontren Pada Kemenag Kota Bandung. *Jurnal Tahsinia*, 5(6), 953–965. <http://jurnal.rakeyansantang.ac.id/tahsinia/article/view/347>
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report, 2023: technology in education: a tool on whose terms?* <https://doi.org/https://doi.org/10.54676/UZQV8501>

Yusuf, M., Akbar, M., Syam, A. A., & ... (2025). Modernisasi Pendidikan Islam Antara Pembaharuan Kurikulum Dan Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional. ... (*Jurnal Pendidikan Islam* ...), 04(04), 2–7.  
<https://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/view/581%0Ahttps://journal.nabest.id/index.php/annajah/article/download/581/369>